

DETEKSI DINI OLEH INTELIJEN POLRI DALAM MENGANTISIPASI GANGGUAN KAMTIBMAS PADA PILKADA DI BOYOLALI

Ary Purwanti

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / arypurwanti@gmail.com

Burham Pranawa

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / burham_9@yahoo.com

Purwadi

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / purwadishmh@gmail.com

Info Artikel

Abstract

Keywords :
(*Early Detection, Intelligence, Disturbances*)

Polri is a government institution that has the main task of enforcing law, maintaining security and order and providing protection, protection and services to the community. One of the functions of the police is security intelligence or what is commonly called intelligence. The objectives of the study were 1) To determine the Early Detection System of the National Police Intelligence Against the Development of Social Security Disruptions in the Implementation of Regional Elections in Boyolali. 2) to find out what are the obstacles faced by the National Police on the Development of Security and Security Disturbances in the Implementation of Pilkada in Boyolali. 3) To find out the efforts made by the Police to the Development of Kamtibmas Disruption in the Implementation of the Regional Head Election in Boyolali. This research is descriptive analytical. This research is a field research research. The types of data used are primary data and secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials. This library research is carried out by searching, collecting, and studying laws and regulations and other legal materials related to the object of research. The results of the research are in realizing orderly demonstrations, the implementation of intelligence gathering needs to be optimized in order to be able to create, change a condition in society so as to achieve a favorable condition for the implementation of the main task of the National Police to maintain security and security. In its implementation, the optimization of the implementation of intelligence is still experiencing problems, namely: the number of demonstrations is still an indicator that the implementation of mobilization targeting individuals and groups that often carry out demonstrations is not yet optimal. The method of raising is not well planned and well-directed, the mobilization with target people is carried out openly, the ability to infiltrate is not yet available, the raising tactics are minimal. This is due to the lack of human resources' skills, knowledge and problem-solving abilities.

Abstrak

Kata kunci:

(Deteksi Dini, Intelijen,
Gangguan Kamtibmas)

Polri merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok penegakkan hukum, memelihara kamtibmas serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah Intelijen keamanan atau yang biasa disebut intelkam. Tujuan penelitian adalah 1) Untuk mengetahui Sistem Deteksi Dini Intelkam Polri Terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Boyolali. 2) untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Polri terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas dalam Penyelenggaraan Pilkada di Boyolali. 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polri terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas dalam Penyelenggaraan Pilkada di Boyolali. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini merupakan penelitian field reasearch. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Hasil penelitian yaitu dalam hal mewujudkan unjuk rasa yang tertib, penyelenggaraan penggalangan intelijen perlu dioptimalkan agar mampu membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi dalam masyarakat sehingga mencapai keadaan yang menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas pokok Polri memelihara Kamtibmas. Dalam pelaksanaannya optimalisasi penyelenggaraan intelijen masih mengalami persoalan yaitu: masih maraknya unjuk rasa menjadi salah satu indikator bahwa pelaksanaan penggalangan dengan sasaran perorangan dan kelompok yang sering melakukan unjuk rasa belum optimal. Metode penggalangan yang dilakukan belum terencana dan terarah dengan baik, penggalangan dengan sasaran orang dilaksanakan secara terbuka, kemampuan penyusupan belum ada, taktik penggalangan yang minim. Hal itu disebabkan kemampuan SDM yang kurang akan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan memecahkan masalah.

Masuk : 23 Maret 2021

Diterima : 27 April 2021

Terbit : xx April 2020

Corresponding Author:

burham_9@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

Polri merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok penegakan hukum, memelihara kamtibmas serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka dalam institusi Polri diperlukan fungsi-fungsi kepolisian yang

mempunyai wilayah kerja masing-masing yang saling terkait dan terpadu. Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah Intelijen keamanan atau yang biasa disebut intelkam. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi kepolisian.¹ Kata intelijen berasal dari bahasa Inggris “*intelligence*” yang secara harfiah berarti kecerdasan.²

Secara khusus yang berkaitan dengan upaya mengamankan Negara dan Bangsa. Dalam dasar intelijen, intelijen dapat kita bedakan yaitu intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah, sebagai organisasi, dan sebagai kegiatan. Ketiga pengertian ini, walaupun terpisah namun selalu berkaitan satu dengan yang lain.³ Intelijen keamanan merupakan bagian integral dari fungsi organik Polri yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi intelijen baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Fungsi intelkam merupakan fungsi intelkam yang bertugas sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, dan juga bertugas mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas.⁴

Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah sampai ke tingkat nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Fungsi Intelkam sebagai pelaksana fungsi intelijen keamanan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

¹ Mahfud, M. 1993. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. Hlm: 56.

² Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, 1988, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, Hlm. 326

³ Nadir, A. 2005. *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*. Malang: Averroes Press. Hlm: 82.

⁴ Warasih, E. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT Suryandaru. Hlm: 75.

undangan. Fungsi intelkam polri sangat berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan tentang perkembangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Diperlukan analisa intelijen yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan tentang perkembangan kamtibmas dapat diantisipasi oleh kepolisian. Maka dituntut peran dan fungsi intelkam dalam menjalankan tugasnya dalam menghadapi perkembangan paradigma kamtibmas yang terjadi di wilayah tugasnya masing-masing.

Salah satu tugas intelkam adalah sebagai “mata dan telinga” Kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas. Di dalam Intelkam Polri terdapat Sistem deteksi Intelpampol, sistem ini sebagai bagian dari Sistem Operasional Intelpampol dalam rangka mewujudkan kemampuan Intelpampol sebagaimana yang ditetapkan. Pada hakekatnya sistem deteksi dini ini bertitik tolak dari dasar-dasar pelaksanaan tugas Intelpampol. Dasar - dasar pelaksanaan tugas Intelpampol bermula dari pengertian bahwa Intelijen itu adalah untuk Pimpinan dalam kualifikasinya.⁵

Sebagai Kepala/Komandan, Sebagai unsur pemerintah, Sebagai Pimpinan masyarakat, Sebagai Bapak dari keluarga besar Polri. Dimana pelaksanaan tugas Intelpampol diselenggarakan oleh jaringan Intelpampol di atas permukaan secara struktural formal dengan didukung oleh adanya jaringan Intelijen di bawah permukaan. Sistem Deteksi Intelpampol dapat dilihat dari subyek penyelenggaranya, metoda yang dipakai serta obyek sarannya. Deteksi Intelpampol diselenggarakan melalui jaringan Intelpampol di atas permukaan (jaringan Intelpampol struktural formal) mulai dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Mabes Polri dengan menetapkan Polsek sebagai Basis Deteksi Intelpampol, Polres sebagai Basis Operasional dan Polresta ke atas memberikan Back Up Operasional.⁶

⁵ Ramadhan, N. A. 2018. *Peran Intelkam Polda Lampung Dalam Mengidentifikasi Ancaman Terhadap Gangguan Kamtibmas*. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Hlm: 9

⁶ Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung. Hlm. 68

Metode yang dipergunakan dalam penyelenggaraan deteksi Intelampol dengan mempergunakan Pola Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) yang berlaku sesuai dengan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) meliputi Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Vertikal, Horizontal, Diagonal dan Lintas Sektoral serta Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) dalam kaitan Intelijen Komuniti dimana dalam pengumpulan bahan keterangan dilakukan melalui 3 jalur yaitu jalur struktural formal, jalur opsional dan jalur jaringan bawah permukaan.⁷

Sistem Deteksi dini yang berajalan di tingkat kewilayahan akan menghasilkan informasi Intelijen yang diperoleh melalui suatu proses pengolahan dari bahan keterangan yang didapat. Bahan keterangan merupakan bahan dasar yang masih mentah. Bahan mentah ada yang memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen. Bahan mentah yang memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen adalah bahan – bahan yang berkaitan dengan masalah keamanan, yang dapat dipercaya sumbernya dan relevan dengan masalah yang dicari atau dibutuhkan. Intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah adalah merupakan hasil terakhir atau produk daripada pengolahan yang selanjutnya disampaikan kepada pihak – pihak pemakai untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana dan kebijaksanaan yang akan ditempuh dan yang memungkinkan untuk bahan mengambil keputusan.

Intelkam polri sangat berperan penting dalam memberikan deteksi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat. Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Intelkam polri sebagai pelaksana fungsi intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani

⁷ *Ibid.* Hlm: 69.

secara profesional dan proporsional. Di dalam intelkam terdapat intel dasar dimana Intelijen dasar digunakan untuk pengetahuan dasar atau catatan dasar bagi pihak yang menggunakan yang bertujuan untuk memberikan arti pada gejala – gejala dan perubahan – perubahan yang terjadi pada suatu waktu di masa lalu.

Tanpa adanya pengetahuan dasar mengenai sesuatu masalah tertentu, sukar untuk dinilai secara tepat suatu fenomena atau perubahan yang terjadi mengenai masalah tersebut, dan mungkin tidak akan ada artinya pengetahuan mengenai perkembangan mengenai masalah tersebut di masa yang akan datang terutama tentang perkembangan kamtibmas. Dalam memberikan gambaran tentang gangguan kamtibmas yang akan dihadapi, intelkam mempunyai Intelijen yang diramalkan (*Forecasting*).⁸

Intelijen yang diramalkan mempunyai peranan penting bagi intelijen. Karena perkembangan yang lampau dan perkembangan yang sedang terjadi dicerminkan oleh Intelijen Dasar Diskriptif dan Intelijen Aktual, sedangkan intelijen yang diramalkan meramalkan perkembangan yang akan terjadi di masa datang sebagai lanjutan proses perkembangan yang sedang terjadi. Dengan kata lain sebagai bentuk gambaran spekulatif tentang apa yang akan terjadi.

Deteksi dini oleh fungsi Intelijen terus dilakukan untuk mengetahui setiap perkembangan ancaman Kamtibmas yang mungkin berkembang. Hasil deteksi dini bisa dilakukan deteksi aksi atau cegah dini melalui kegiatan patroli dan penjagaan lokasi tertentu untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas. Polri dalam melaksanakan tugas pengamanan dengan cara sosialisasi dan koordinasi kepada perangkat keamanan yang ada di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan tugas yang bersifat pre-emptif dengan cara sosialisasi oleh Babinkamtibmas. Peran Polsek sebagai basis deteksi dapat terwujud. Selain pada Unit Intelkam, tugas deteksi dini juga diemban oleh Unit Binmas melalui kegiatan Pemolisian Masyarakat (Polmas).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian dengan mencocokka peraturan perundang-undangan dengan

⁸ Morissan. 2005. *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Prakarsa. Hlm: 46.

pelaksanaan di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data primer yaitu penelitian langsung di lapangan (field research) di wilayah hukum Polres Boyolali dan jenis data sekunder yaitu penelitian pustaka (library research). Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pengertian analisis kualitatif adalah suatu cara pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif. Data sekunder yang telah tersedia menjadi pangkal penelitian dihubungkan dengan data primer yang meliputi hasil observasi dan wawancara kemudian dianalisa secara kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Sistem Deteksi Dini Intelkam Polri Terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Boyolali

Fungsi intelijen telah dikenal sejak zaman dahulu kala serta diakui menduduki peran menentukan dalam konteks pertahanan dan juga keamanan. Pemanfaatan intelijen dalam setiap operasi khususnya operasi militer merupakan hal mutlak. Intelijen berkaitan dengan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan *early warning system* (sistem peringatan dini). Kegiatan intelijen merupakan bagian integral sistem peringatan dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki *fore knowledge* (kewaspadaan dini). Tugas umum intelijen adalah mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terbaik untuk mencapai tujuan. Sedangkan tugas khusus badan intelijen adalah: (1) Memberikan analisa dalam bidang-bidang yang relevan dengan keamanan nasional, (2) Memberikan peringatan dini atas krisis yang mengancam, (3) Membantu manajemen krisis nasional dan internasional dengan cara mendeteksi keinginan pihak lawan atau pihak-pihak yang potensial menjadi lawan, (4) Memberi informasi untuk kebutuhan perencanaan keamanan nasional, (5) Melindungi informasi rahasia, dan

(6) Melakukan operasi kontra-intelijen.

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas intelijen di lingkungan Polri, kegiatan operasional Intelkam diklasifikasikan dalam tiga bentuk yang berlaku juga secara universal yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kegiatan operasional Intelkam dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek/aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri lainnya. Kegiatan operasional Intelkam dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup. Penyelidikan merupakan upaya mencari dan mengumpulkan bahan informasi; pengamanan merupakan upaya mengamankan organisasi agar tidak menjadi sasaran lawan; penggalangan merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang menguntungkan organisasi. Oleh karena itu, spektrum kegiatan Intelkam dalam pelaksanaan tugas Polri adalah mendahului, menyertai dan mengakhiri setiap kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan oleh Polri. Penyelidikan dalam Intelkam adalah kegiatan yang merupakan bagian integral fungsi intelijen untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data (bahan keterangan) dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan Polri, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional kepolisian sehingga hasilnya berguna/diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri. Penyelidikan dilakukan untuk mencari, menggali, dan mengumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup melalui kegiatan yang juga terbuka maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan.

Pengamanan dalam konteks Intelkam adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan intelijen yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok Polri yang dilaksanakan dengan menerapkan prosedur, metode, tehnik dan taktik berupa langkah-langkah pencegahan dan penindakan baik langsung, terbuka ataupun tertutup yang terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi berupa penyimpangan norma-norma untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan, serta yang dapat diperkirakan akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan bangsa yang bersumber dari supra struktur,

tehnostruktur, warga masyarakat dan lingkungan. Pengamanan adalah upaya, langkah, dan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengamankan suatu lingkungan beserta dengan segala isinya agar tercipta suasana aman dan tertib serta mensterilkan dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Tugas pokok Intelkam dapat dirumuskan dalam empat kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek- aspek kriminogen, selanjutnya mengadakan identifikasi hakikat ancaman terhadap Kamtibmas;
- b. Menyelenggarakan fungsi intelijen yang diarahkan ke dalam tubuh Polri sendiri dengan sasaran pengamanan material, personil dan bahan keterangan serta kegiatan badan/kesatuan, terhadap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam tubuh Polri agar Polri tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya;
- c. Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri
- d. Melakukan pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu memperoleh peluang dan dapat memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam bidang Ipleksosbud Hankam, sebagai sarana eksploitasi untuk menciptakan suasana pertentangan patif menjadi aktif, sehingga menimbulkan ancaman atau gangguan di bidang Kamtibmas.

3.2 Kendala yang dihadapi Polri Terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Boyolali

Seiring perkembangan teknologi, banyak sekali kejahatan IT terutama hoax dan black campaig yang viral di media sosial sehingga menimbulkan potensi konflik sara, kendala Polri selama ini kesulitan dalam hal pengungkapan pelaku penyebar hoax dan pemilik konten yang tidak bertanggung jawab. Untuk

membangun dan mengoptimalkan kemampuan penggalangan kemampuan SDM sangat penting. Kualitas SDM yang dimiliki oleh Polres Boyolali dalam melakukan penggalangan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Keterampilan (*skill*)

1. Lemahnya ketrampilan anggota dalam menguasai teknik penggalangan;
2. Penentuan tema belum diimbangi dengan penggunaan media penyampai pesan yang tepat. Media penyampai pesan yang digunakan sederhana yaitu melalui selebaran, spanduk dan media massa;
3. Pelaksanaan penggalangan belum mendapat dukungan anggaran untuk mendukung kegiatan dan memperoleh peralatan yang dibutuhkan;
4. Belum adanya ketetapan hati yang mantap bagi personil untuk dapat melakukan penggalangan intelijen.

b. Pengetahuan (*Knowledge*)

1. Lemahnya kemampuan deteksi dan peringatan dini serta analisis Intelijen terhadap berbagai fenomena dan peristiwa serta kasus terkait maraknya aksi unjuk rasa;
2. Pengetahuan tentang sasaran kelompok dan perorangan minim yang kontra terhadap para pengunjuk rasa minim.

c. Sikap perilaku (*Attitude*)

1. Masih ditemukan perilaku anggota penggalangan yang tidak memperhatikan faktor keamanan perorangan, kegiatan dan keamanan bahan keterangan dalam melakukan penyebaran pesan;
2. Rasa takut yang ”berlebihan” dari personil pada saat menjalankan teknik dan taktik penggalangan;
3. Kurangnya kepekaan dari personil dalam menentukan media yang efektif menyampaikan pesan kepada sasaran.

3.3 Upaya yang dilakukan Polri Terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Boyolali.

Dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang akan timbul di pilkada Kabupaten Boyolali, intelkam Polres Boyolali melakukan berbagai langkah untuk menanggulangi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas agar

dapat berhasil guna serta berdaya guna, serta untuk dapat berperan aktif dalam mendukung tercapainya kesepakatan yang dicita-citakan masyarakat maka ada beberapa upaya yang perlu ditingkatkan.

Melaksanakan sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI Polri bertugas memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan serta penegakan hukum dan memberikan himbauan terhadap seseorang yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum serta memberikan bimbingan setiap potensi yang menyebabkan gangguan kamtibmas di wilayah Kabupaten Boyolali. Peningkatan kemampuan penyelidikan, yang perlu ditingkatkan adalah sebagai berikut :

- a. Kemampuan kelompok/organisasi;
- b. Kemampuan perorangan, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan Kemampuan penyelidikan.
 - 2) Peningkatan Kemampuan Pengamanan.
 - 3) Peningkatan Kemampuan untuk mengendalikan kegiatan.

Kegiatan Intelijen dilakukan melalui beberapa tahapan sebelum pelaksanaan sesuai dengan siklus Intelijen dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyajian, untuk itu perlu kendali dalam pelaksanaan tersebut.

4. PENUTUP

4.1.Kesimpulan

- a. Secara garis besar sistem deteksi dini Intelkam Polri terhadap perkembangan gangguan kamtibmas dalam penyelenggaraan pilkada di Boyolali adalah dengan melaksanakan penggalangan, monitoring dan koordinasi kepada panitia penyelenggaraan pemilu (KPU dan BAWASLU Boyolali) ,partai politik peserta pemilu, tim sukses serta relawan dalam pelaksanaan pemilu 2019 dan bekerja sama dengan Steckholder lainnya (unsur pemerintahan Kabupaten Boyolali) guna melaksanakan deteksi terhadap potensi konflik dan tahapan pemilu 2019.

- b. Kendala Polri selama ini kesulitan dalam hal pengungkapan pelaku penyebar hoax dan pemilik konten yang tidak bertanggung jawab. Untuk membangun dan mengoptimalkan kemampuan penggalangan kemampuan SDM sangat penting. Kualitas SDM yang dimiliki oleh Polres Boyolali dalam melakukan penggalangan dapat diuraikan sebagai berikut Lemahnya ketrampilan anggota dalam menguasai teknik penggalangan, Penentuan tema belum diimbangi dengan penggunaan media penyampai pesan yang tepat. Media penyampai pesan yang digunakan sederhana yaitu melalui selebaran, spanduk dan media massa, Pelaksanaan penggalangan belum mendapat dukungan anggaran untuk mendukung kegiatan dan memperoleh peralatan yang dibutuhkan, Belum adanya ketetapan hati yang mantap bagi personil untuk dapat melakukan penggalangan intelijen. Lemahnya kemampuan deteksi dan peringatan dini serta analisis Intelijen terhadap berbagai fenomena dan peristiwa serta kasus terkait maraknya aksi unjuk rasa. Masih ditemukan perilaku anggota penggalangan yang tidak memperhatikan faktor keamanan perorangan, kegiatan dan keamanan bahan keterangan dalam melakukan penyebaran pesan.
- c. Dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang akan timbul di pilkada Kabupaten Boyolali, intelkam Polres Boyolali melakukan berbagai langkah untuk menanggulangi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas agar dapat berhasil guna serta berdaya guna, serta untuk dapat berperan aktif dalam mendukung tercapainya kesepakatan yang dicita - citakan masyarakat maka ada beberapa upaya yang perlu ditingkatkan. Melaksanakan sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI Polri bertugas memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan serta penegakan hukum dan memberikan himbauan terhadap seseorang yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum serta memberikan bimbingan setiap potensi yang menyebabkan gangguan kamtibmas di wilayah Kabupaten Boyolali.

4.2 Saran

- a. Memberikan rekomendasi kepada Kapolda melalui Dir Intelkam untuk memformalkan struktur unit penggalangan serta mengalokasikan anggaran penggalangan kedalam DIPA pada tahun anggaran yang akan

datang.

- b. Agar sistem deteksi dini intelkam Polri lebih mendapat pemahaman dan perhatian yang lebih sehingga dapat melakukan antisipasi yang tepat nantinya ketika melakukan tugas dilapangan.
- c. Sistem deteksi dini intelkam polri sangat berperan dalam mengantisipasi ancaman gangguan kamtibmas yang mungkin terjadi, sehingga sebaiknya produk intelijen yang diberikan kepada pimpinan harus produk yang betul-betul akurat.

DAFTAR PUSTAKA:

- Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung.
- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, 1988, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Mahfud, M. 1993. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Morissan. 2005. *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Prakarsa.
- Nadir, A. 2005. *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*. Malang: Averroes Press.
- Nawawi, H. 1998. *Metode Penelitian di Bidang Sosial*. Cet. Ke-8. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Ramadhan, N. A. 2018. *Peran Intelkam Polda Lampung Dalam Mengidentifikasi Ancaman Terhadap Gangguan Kamtibmas*. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- Warasih, E. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT Suryandaru.

Peraturan Perundang-Undangan:

UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI